

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DAN PENGAWASAN DPRD
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK MEWUJUDKAN
*GOOD GOVERNANCE***

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

HAFIZH ANSHARI

201810110311007

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2023

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DAN PENGAWASAN DPRD
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE

Diajukan Oleh:

HAFIZH ANSHARI

201810110311007

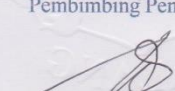
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 30 September 2023

Pembimbing Utama,


Dr. Catir Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

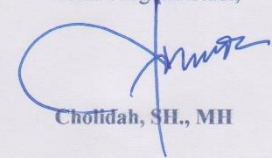

Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.



Dekan,

Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

HAFIZH ANSHARI

201810110311007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 30 September 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

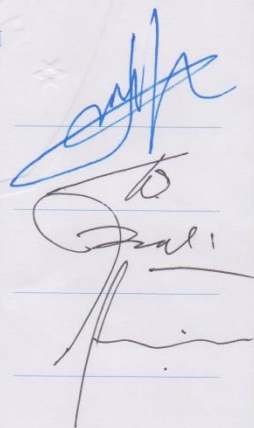
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H.

Penguji I : Sumali, SH., M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : HAFIZH ANSHARI

NIM : 201810110311007

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DAN PENGAWASAN DPRD
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 16 Oktober 2023

Hafizh Anshari

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Tidak ada yang sempurna di dunia ini.
Jika kesempurnaan itu ada,
Maka segala hal tidak akan menarik lagi.

Motto:

“Allah tidak akan membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Q.S Al-Baqarah, 2: 286)



ABSTRAKSI

Nama : Hafizh Anshari
NIM : 201810110311007
**Judul : Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Pengawasan DPRD
Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Mewujudkan *Good Governance***
**Pembimbing : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.
Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H.**

DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dengan fungsinya sebagai lembaga Legislasi dan Pengawasan yang berperan aktif dan kompleks dalam membuat kebijakan daerah, pertanggungjawaban terhadap kelayakan serta kepatutan dalam suatu rancangan peraturan daerah, dan mengontrol implementasi peraturan daerah hingga kebijakan pemerintah daerah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan meningkatkan pelaksanaan fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar dapat meningkatkan kualitas dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan meneliti sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum berjalan maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari data Rancangan Peraturan Daerah tahun 2020-2022 yang selesainya tidak sesuai dengan target karena faktor internal maupun eksternal seperti tidak sesuainya latar belakang pendidikan anggota, kepentingan individu, isu politik dan partai, waktu yang lama dalam proses pembahasan, tidak adanya standar operasional pelaksanaan dalam pelaksanaan pengawasan, dan banyak anggota yang dominan mengamankan posisi dan kepentingan politik. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yaitu perlunya memperbanyak bimbingan teknis bagi anggota Badan Legislasi, mengenyampingkan kepentingan individu, adanya pedoman pelaksanaan pengawasan agar transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat untuk mewujudkan *Good Governance*.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan.

ABSTRACT

Name : Hafizh Anshari
NIM : 201810110311007
Tittle : *Implementation of the Legislative and Supervision Functions of the Regional People's Representative Council of South Hulu Sungai Regency to Realize Good Governance*
Supervisor : Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.
Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H.

DPRD is a Regional People's Representative institution that is domiciled as an element of local government administration with its function as a Legislation and Supervision institution that plays an active and complex role in making regional policies, accountability for feasibility and appropriateness in a draft regional regulation, and controlling the implementation of regional regulations to local government policies. The formulation of the problem in this study is the implementation of the Legislation and Supervision Function of the South Hulu Sungai Regency DPRD, then the factors that affect the implementation of the Legislation and Supervision Function of the South Hulu Sungai Regency DPRD, and improving the implementation of the Legislation and Supervision function of the South Hulu Sungai Regency DPRD in order to realize good governance. The purpose of this study is to determine and examine the implementation of the Legislation and Supervision Function in the South Hulu Sungai Regency DPRD in order to improve quality in order to realize Good Governance. The research method used is an empirical juridical approach by examining primary and secondary data sources with data collection techniques through interviews and literature studies, then analyzed descriptively qualitatively. The results of research and discussion show that the implementation of the Legislation and Supervision Function of the South Hulu Sungai Regency DPRD has not run optimally, this can be seen from the data of the 2020-2022 Regional Regulation Draft whose completion is not in accordance with the target due to internal and external factors such as inappropriate educational backgrounds of members, individual interests, political and party issues, a long time in the discussion process, There are no operational standards of implementation in the implementation of supervision, and many dominant members secure political positions and interests. The conclusions and suggestions in this study are the need to increase technical guidance for members of the Legislative Body, put aside individual interests, the existence of guidelines for the implementation of supervision so that it is transparent, and can be accounted back to the community to realize Good Governance.

Keywords: *Regional People's Representative Council, Legislative Function, Supervision Function.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Mewujudkan Good Governance”**. Sholawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta Keluarga dan Sahabatnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak melalui berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi disamping hal tersebut Allah SWT selalu memberikan jalan kemudahan dengan cara yang tidak terduga hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu memberikan bimbingan, petunjuk, serta bantuan lainnya yang sangat bermanfaat. Maka dari itu, dalam kesempatan ini dari penulis secara khusus mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Orang Tua penulis yaitu Zaini Fahri, S.H., M.Si (Bapa) dan Nani Trisnawati, S.Kep., MM (Mama) yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, tenaga, nasihat, serta cinta yang membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Keluarga besar penulis yaitu Norhafizha Rinanda, S.Psi., M.Psi., Psikolog (Aa), Muhammad Yusril Rizqani, S.H., dan Muhammad Zulfan Raghobie, S.H. yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun immaterial.
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh jajaran Pimpinan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Sholahuddin Al Fatih, SH., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Dr. Haris, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang telah mendukung dan memberikan arahan sejak awal perkuliahan hingga proses penyelesaian tugas akhir.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bersedia untuk memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh penulis.
7. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 khususnya kelas A yang memberikan semangat, doa, serta bantuan kepada penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga apa yang sudah diberikan kepada penulis dapat dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik. Semoga penelitian ini berguna dengan baik untuk penulis serta pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih dan semoga niat baik yang kita lakukan dapat membantu dalam meraih yang kita harapkan di dunia maupun di akhirat. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*

Malang, 17 Agustus 2023

Penulis

Hafizh Anshari



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Bagi Penulis	8
2. Bagi Mahasiswa.....	9
3. Bagi DPRD	9
4. Bagi Pemerintah Daerah	9
5. Bagi Masyarakat	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Lokasi Penelitian.....	11
3. Jenis Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
a. Wawancara langsung	12
b. Studi Dokumentasi	13
c. Studi Pustaka.....	13
5. Pengolahan Data	13
a. <i>Editing</i> (Edit).....	14
b. <i>Classifying</i> (Klasifikasi).....	14
c. <i>Verifying</i> (Verifikasi)	14
d. <i>Concluding</i> (Kesimpulan)	14
6. Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Konsep Fungsi Legislasi.....	17

1. Pengertian Legislasi	17
2. Fungsi Legislasi	20
B. Konsep Fungsi Pengawasan	25
1. Tipe Pengawasan	28
C. Konsep Tata Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	30
D. Konsep Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	36
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	36
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang, Serta Hak dan Kewajiban Anggota DPRD.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan	42
1. Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	43
a. Visi	43
b. Misi	43
2. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	44
a. Tugas Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan .	44
b. Susunan Anggota DPRD.....	45
B. Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	47
1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	47
2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	62
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan... ..	86
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	87
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	91
D. Upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Governance</i>	93
1. Meningkatkan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Governance</i>	93
2. Meningkatkan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Rangka Mewujudkan <i>Good Governance</i>	96
E. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	97
1. Akuntabilitas	98
2. Transparansi (keterbukaan).....	98

3. Partisipasi (Melibatkan Masyarakat, Terutama Aspirasinya).....	98
4. Supremasi Hukum Aparat Birokrasi.....	99
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	114



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2019-2024.....	45
Tabel 2. Anggota Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2019-2024	46
Tabel 3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2022	53
Tabel 4. Kegiatan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	71
Tabel 5. Kegiatan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	75
Tabel 6. Kegiatan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022	79



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA.....	114
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan.....	115
Lampiran 3. Surat Izin Observasi	117
Lampiran 4. Bukti Penelitian (SK Sekretariat DPRD)	118
Lampiran 5. Bukti Penelitian (Dokumentasi)	119
Lampiran 6. Hasil Plagiasi	122



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- B.N. Marbun. 1983. *DPRD Pertumbuhan: Masalah dan Masa depannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Governance and Development. 1992. DC. World Bank. Washington.
- Handoko. H. 1999. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. PT Rafika Aditam. Jakarta.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta.
- Hendry Campbell Black. 1978. *Black's Law Dictionary*. West Publishing. United State of American.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Mohamad Khamim. 2021. *Peran DPRD dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Pekalongan*. PT. Nasya Expanding Management. Jawa Tengah.
- Ni'matul Huda. S. H.. & Nazriyah. R. 2019. *Teori dan pengujian peraturan perundang-undangan*. Nusamedia. Yogyakarta.
- Razak. I.M.R.R.. 2022. *Kaitan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik. Good Governance Dalam Pelayanan Publik*. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Sarwoto. 1991. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administiras Publik. Reformasi Birokrasi. dan Kepemimpinan Masa Depan*. Refika Aditama. Bandung.

Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta. Jakarta.

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Alpin Mandjoro. 2019. Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Poso. Disertasi. POLITEKNIK STIA Lan Makassar.

Alvian. Alvian. 2019. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu. Disertasi. Universitas Islam Riau

Arif Kurnia. 2023. Implementasi Good Governance. Tesis. Universitas Pasundan. Bandung.

Gustina. D. C. 2022. Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah. Disertasi. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Mandini. D. D. S. 2019. Peran Anggota Legislatif Perempuan dalam Menjalankan Fungsi DPRD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014-2019. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Riyanto. D. 2022. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Pekanbaru. Disertasi. Universitas Islam Riau.

JURNAL

Achamd Fauzi. 2014. *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol. 1 No. 2.

Antari. P. E. D. 2020. *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*. Refleksi Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No 2.

Dewi. L. R. 2020. *Perspektif Positivisme Kedudukan Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Yang Telah Dicaput Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan. Vol 7. No 1.

Fadli. M. 2018. *Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 15. No 1.

Lena Satlita. 1996. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Cakrawala Pendidikan Nomor 1.

Muhsinhukum. M. 2021. *Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum Das Sollen. Vol 5. No 1.

Niko. N. & Sudi. A.. 2019. *Implementasi Fungsi Legislasi Dan Pengawasan DPRD (Studi Kasus DPRD Kabupaten Mamasa Periode 2014-2019)*. Mitzal (Demokrasi. Komunikasi dan Budaya). Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi. Vol 4. No. 2.

Sadu Wasistiono. & Yonatan Wiyoso. 2013. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Penerbit Fokusmedia. Bandung.

Santoso. M.A.. 2011. *Peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol 18. No 4.

Sopyan Resmana & Rachmat Ramdani. 2022. *Menimbang Perilaku Elit Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Etika Pemerintahan*. Jurnal Politikom Indonesiana. Kajian Ilmu Pemerintahan. Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi. Vol 7. No. 1.

Sugiman. S. 2020. *Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Vol 10. No 2.

Winarna. Jaka & Murni. 2007. *Pengaruh Personal Background. Pengaruh Politic Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Surakarta. Vol 9. No 2.

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (online). <https://kbbi.web.id/legislasi>. diakses. Selasa. 27 September 2022

Website Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>. Diakses tanggal 17 Mei 2023 pukul 8.30 WIB

Website Resmi Pemerintah Hulu Sungai Selatan. www.hulusungaiselatan.go.id. diakses pada 17 Mei 2023 pukul 8.20 WIB

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041).

Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2019-2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA



FAKULTAS HUKUM
hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: E.6.o/381/FH-UMM/VIII/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Dr. Catur Wido Haruni, S.H, M.Si., M.Hum
Pembimbing I
2. Nama : Sholahuddin Al-Fatih, S.H.,M.H
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Hafizh Anshari
NIM : 201810110311007
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Mewujudkan Good Governane

Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 30 Agustus 2022
Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 30 Agustus 2021


Dekan,

Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
 Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : HAFIZH ANSHARI

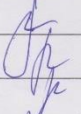
2. No. Induk Mahasiswa : 201810110311007

3. Judul Tugas Akhir : PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DAN
PENGAWASAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI
SULATAN UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir :

5. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.
 2. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H.

6. Jadwal Bimbingan : Mulai Tgl. s/d

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1	20/4/22			BAB I Revisi
2	25/4/22			BAB I Acc
3	14/5/22			BAB I Revisi
4	29/5/22			BAB I Revisi
5	11/6/22			BAB I Acc
6	22/6/22			BAB II Revisi
7	6/8-2022			BAB II - Pemb. II
8	9/11-2022			Pemb. II: <u>Sholahuddin</u>
9	12/11-2022			Del. Bab II
10				kon. Bab II - Pemb. II
11	24/11-2022			kon. Bab III - Pemb. II
12	10/12-2022			kon. Bab III - Pemb. II
13				Pengantar <u>DRD</u>
14	15/12-2022			kon. Bab III - Pemb. II
15	21/12/2022			Acc
16	21/12-2022			kon. Bab III - Pemb. II
17				BAB IV - Pemb. II - Abstrak
18	22/12-2022			Del. Bab IV - Pemb. II
19	24/12-2022			Del. kesimpulan

Lampiran 3. Surat Izin Observasi

 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG		FAKULTAS HUKUM hukum.umm.ac.id fh@umm.ac.id	
Nomor	: E.6.k/200/FH-UMM/IV/2022	Malang, 18 April 2022	
Lamp	: -		
Hal	: Permohonan Izin Observasi dan Wawancara		
Kepada	: Yth. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kec. Kandangan, Prov. Kalimantan Selatan di Tempat		
			
<i>Assalamu 'alaikum Wr.Wb</i>			
Dengan hormat, bahwa dalam rangka menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S-1), maka kepada mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediaannya Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada:			
Nama	: Hafizh Anshari		
NIM	: 201810110311007		
No. HP Mahasiswa	: 081254869178		
Judul Tugas Akhir	: Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai selatan Untuk Mewujudkan Good Governance		
Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.			
<i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb</i>			
Hormat Kami Wakil Dekan I,  Bayu Dwiwidy Jatmiko, SH., M.Hum 			

Lampiran 4. Bukti Penelitian (SK Sekretariat DPRD)



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Jalan Pangeran Antasari No. 2 Telp. (0517) 21042 Fax.(0517) 21172
Kandangan 71211

SURAT KETERANGAN
800/076/Set.DPRD/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SALAHUDDIN, S.Kep, Ners, MM
N I P : 19660315 198603 1 007
J a b a t a n : Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : HAFIZH ANSHARI
N I M : 201810110311007
Fakultas/Universitas : Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Malang

Telah melakukan penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka penyusunan tugas akhir sebagai persyaratan menyelesaikan studi Strata (S1) Hukum dengan judul Skripsi " Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Untuk Mewujudkan Good Governance

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 2 Mei 2022

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



SALAHUDDIN, S.Kep, Ners, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19660315 198603 1 007

Lampiran 5. Bukti Penelitian (Dokumentasi)







Lampiran 6. Hasil Plagiasi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Hafizh Anshari

Nim : 201810110311007

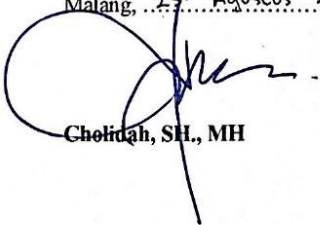
Dengan Judul Skripsi :

Pelaksanaan Fungsi Legislasi dan Pengawasan
 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 untuk Mewujudkan Good Governance

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Agustus 2023


Cholidah, SH., MH

**LOLOS
PLAGIASI**